

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

(Sarwono, 2015) menyatakan bahwa, Usaha dan Menengah (usaha mikro) berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional, yaitu sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, usaha mikro juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan, kemudian usaha mikro juga tidak terpengaruh terhadap krisis. Setiap daerah ada potensi untuk usaha usaha tumbuh dan berkembang menjadi usaha menengah dan usaha besar, tidak terkecuali di Kota Jambi. Mengenai data jumlah usaha mikro per kecamatan di Kota Jambi bisa dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Jumlah usaha mikro Per Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah
1	Telanaipura	361
2	Jambi Selatan	469
3	Jambi Timur	683
4	Pasar Jambi	421
5	Pelayangan	289
6	Danau Teluk	95
7	Kota Baru	231
8	Jelutung	159
9	Alam Barajo	348
10	Danau Sipin	234
11	Paal Merah	216
Total		3506

Sumber : Dinas Koperasi dan usaha mikro Kota Jambi

Pada tabel 1.1 dapat dilihat jumlah Usaha atau usaha mikro di Kota Jambi sebanyak 3.506 unit. Pemilik usaha mikro perlu memiliki perilaku keuangan yang baik karena selain harus berhati-hati dalam mengelola keuangan pribadinya, mereka juga harus mengelola keuangan usahanya. Banyak pemilik usaha mikro yang mengira penjualannya meningkat, namun keuntungan yang mereka terima tetap sama. Selain itu, banyak pemilik usaha mikro yang menggabungkan keuangan pribadi dan bisnisnya. Beberapa dari mereka bahkan tidak memiliki pencatatan keuangan yang memadai. (Widayanti et al., 2017) mengemukakan hal ini disebabkan rendahnya minat pemilik usaha mikro untuk melakukan pencatatan dan pembukuan pada setiap transaksi yang mereka lakukan dan hal ini pada akhirnya akan menyulitkan mereka untuk memantau perkembangan usaha mereka. Selain itu, lembaga keuangan juga akan kesulitan meminimalkan risiko gagal bayar atas pinjaman yang diberikan kepada usaha mikro.

Dalam rangka memperbaiki keadaan keuangan pengusaha usaha mikro, bisa dilihat dari keberhasilan pelaku usaha mikro dalam mengontrol dananya sendiri agar terhindar dari masalah keuangan yaitu dengan pengelolaan keuangan secara baik dan mampu menentukan skala prioritas kebutuhan bukan keinginan. Maka dari itu pelaku usaha perlu memperhatikan bagaimana cara berperilaku ketika dihadapkan dengan keputusan keuangan yang harus dibuat. Keberhasilan usaha mikro salah satunya yaitu didukung dengan perilaku keuangan pelaku usaha yang baik. Perilaku keuangan menurut (Statman, 2008), merupakan hasil dari struktur berbagai ilmu. Struktur ilmu yang pertama yaitu psikologi yang menganalisis proses perilaku dan pikiran bagaimana proses psikis ini dipengaruhi oleh fisik,

dan lingkungan eksternal manusia. Struktur ilmu yang kedua adalah *finance* atau keuangan, termasuk didalamnya adalah bentuk sistem keuangan, distribusi dan penggunaan sumber daya. Struktur ilmu yang ketiga yaitu sosiologi yang sistematis yaitu berisi tentang perilaku manusia atau kelompok yang lebih menekankan pengaruh hubungan sosial pada sikap dan perilaku masyarakat. (Chinen & Endo, 2018) dalam Herdinata dan Pranatasari (2020), yang menyatakan bahwa individu yang memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang benar tentang keuangan maka tidak akan memiliki masalah keuangan dimasa depan dan hal itu membuktikan perilaku keuangan yang sehat dan mampu menentukan skala prioritas kebutuhan bukan keinginan. (Hilgert et al., 2003), menyatakan bahwa perilaku keuangan yang sehat ditunjukkan oleh aktivitas perencanaan, pengelolaan serta pengendalian keuangan yang baik sehingga kesejahteraan finansial dapat tercapai.

Menurut Literasi keuangan dan Inklusi keuangan jadi menarik untuk diteliti karena pada Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) yang dilakukan oleh OJK tahun 2013 menunjukkan adanya hubungan erat antara literasi keuangan dengan inklusi keuangan, dikarenakan jika semakin tinggi literasi keuangan seseorang maka semakin besar pula tingkat pemanfaat produk dan layanan jasa keuangannya (otoritas jasa keuangan, 2017). Literasi keuangan juga dapat diartikan sebagai suatu proses untuk meningkatkan pengetahuan (knowledge), kemampuan (skill), dan keyakinan (confidence) agar keuangan masyarakat dapat lebih sejahtera dan juga mampu mengelola keuangan.(Eni & Risa, 2020). dalam mengukur literasi keuangan dapat menggunakan indeks literasi keuangan untuk menentukan tingkat pengetahuan, kepercayaan dan kecakapan masyarakat pada lembaga keuangan (Sri,

2015).

Tabel 1.2
Indeks Literasi Keuangan – Nasional Provinsi Indonesia Tahun 2022

LITERASI KEUANGAN		
No	PROV	LITERASI
1	Riau	67,27
2	NTB	65,45
3	Bangka Belitung	62,34
4	Kaltara	58,70
5	Bali	57,66
6	Kaltim	57,14
7	Sulteng	56,36
8	Jabar	56,10
9	Jatim	55,32
10	DIY	54,55
11	Papua Barat	54,29
12	DKI Jakarta	52,99
13	Sumsel	52,73
14	Gorontalo	52,21
15	NTT	51,95
16	Kalbar	51,95
17	Sumut	51,69
18	Jateng	51,69
19	Sulut	50,13
20	Aceh	49,87
21	Malut	49,35
22	Kepri	48,57
23	Jambi	46,49
24	Sulbar	46,49
25	Banten	45,19
26	Papua	45,19
27	Kalsel	42,06
28	Lampung	41,30
29	Sumbar	40,78
30	Maluku	40,78
31	Sulsel	36,88
32	Kalteng	32,73
33	Sultra	31,95
34	Bengkulu	30,39

Sumber: OJK, 2022

Sumber : OJK 2022

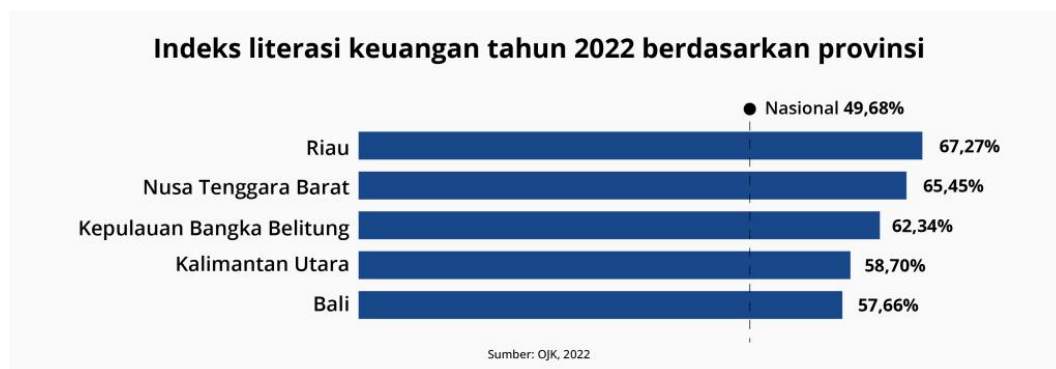
Pada tabel 1.2 diatas dapat dilihat indeks literasi keuangan provinsi Jambi tahun 2019 adalah sebesar 35,17% berada di urutan ke-24 dari 33 provinsi yang ada di Indonesia, hal ini mengindikasikan bahwa literasi keuangan di Provinsi

Jambi tergolong rendah. Dengan rendahnya indeks literasi keuangan di provinsi Jambi akan mempengaruhi akses masyarakat Jambi terhadap lembaga keuangan. Adanya keterkaitan antara literasi keuangan dan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan membuktikan bahwa literasi keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam kemakmuran dan pembangunan masyarakat. Kemudian literasi keuangan juga mempermudah individu dan pelaku usaha dalam berperilaku keuangan secara baik.

Studi empiris menemukan literasi keuangan berpengaruh positif terhadap perilaku keuangan pribadi dan status keuangan. Individu yang melek huruf akan mampu melakukannya dengan baik dalam hal-hal seperti: penganggaran, menabung, mengontrol pengeluaran (Brown & Graf, 2013), mengelola hutang (Lusardi & Mitchell, 2007), berpartisipasi dalam pasar modal (Yoong, 2010), membeli aset investasi berisiko tinggi (Bannier & Neubert, 2016) merencanakan pensiun (Kumar et al., 2019), kemudian (Lusardi & Mitchell, 2007) dan yang terpenting mengelola keuangan rumah tangga dan berhasil mengumpulkan kekayaan (Education, 2019) Dari perspektif bisnis, semakin melek seorang individu semakin besar kemungkinan mereka untuk mengakses pendanaan eksternal dan mengembangkan bisnisnya (Hussain et al., 2018). Maka bisa dikatakan bahwa semakin besar pengetahuan keuangan seseorang, semakin bijak pula perilaku keuangan mereka. Semakin baik literasi keuangan dan perilaku keuangan individu atau pelaku usaha maka akan mempermudah dalam mengelola keuangannya kemudian para pelaku bisnis akan memanfaatkan teknologi untuk pengembangan usahanya.

Kehadiran perusahaan teknologi keuangan atau *financial technology* di Indonesia berkembang pesat, seiring dengan semakin tingginya permintaan masyarakat Indonesia untuk menggunakan layanan teknologi keuangan, maka teknologi tersebut semakin disukai oleh para pengguna, yang menjadikan penggunaan *financial technology (fintech)* semakin tinggi. Perkembangan *fintech* di Indonesia pada tahun 2019 bisa dilihat pada grafik gambar 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.3
Indeks Literasi Keuangan Tertinggi 2022



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2022)

Pada gambar 1.2 menjelaskan bahwa tingkat literasi keuangan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 memiliki tingkat literasi yang tinggi dibandingkan provinsi lain di pulau jawa yaitu sebesar 40 persen. Namun dalam rata-rata nasional hanya sekitar 22 orang dari setiap 100 penduduk yang termasuk dalam kategori memiliki literasi keuangan yang baik (OJK, 2017). Salah satu hal yang dapat mengatasi berbagai penyebab rendahnya literasi keuangan yaitu dengan inklusi keuangan yang berguna untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat Indonesia. Pernyataan ini sejalan dengan strategi Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2017 yang telah memiliki satu pilar tentang edukasi keuangan untuk mengembangkan produk dan layanan jasa keuangan.

Center for Financial Inclusion mendefinisikan inklusi keuangan sebagai akses terhadap produk keuangan yang sesuai termasuk kredit, tabungan, asuransi dan pembayaran, terjadinya akses yang berkualitas termasuk kenyamanan, keterjangkauan, kesesuaian dengan

memperhatikan perlindungan konsumen serta ketersediaan tersebut juga diberikan kepada semua orang. Menurut SNLKI, literasi keuangan masyarakat akan diikuti dengan inklusi keuangan masyarakatnya. Masyarakat yang telah mengetahui lembaga jasa keuangan, terampil memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan, serta memiliki keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan perlu didukung dengan ketersediaan akses kepada lembaga, produk dan layanan jasa keuangan. Hasil Survei Nasional Literasi Keuangan tahun 2017 yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa indeks inklusi keuangan masyarakat Indonesia pada tahun 2013 mengalami peningkatan dari 59,7 persen menjadi 67,8 persen di tahun 2016.

Berdasarkan fenomena dan *research gap* yang telah ditemukan diatas maka menimbulkan ketertarikan peneliti untuk mengangkat tema *Financial Technology (fintech)* , Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan menjadi suatu kajian Empiris atas dasar itu maka penelitian ini ingin mengkaji masalah utama yaitu **“Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Perilaku Kinerja usaha mikro Melalui Pengelolaan Keuangan Di Kota Jambi”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan judul, maka dapat di ambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan?
2. Bagaimana pengaruh inklusi keuangan terhadap pengelolaan keuangan?
3. Bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja usaha mikro?
4. Bagaimana pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja usaha mikro?
5. Bagaimana pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kinerja usaha mikro?

6. Bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja usaha mikro melalui pengelolaan keuangan?
7. Bagaimana pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja usaha mikro melalui pengelolaan keuangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh inklusi keuangan terhadap pengelolaan keuangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja usaha mikro.
4. Untuk mengetahui pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja usaha mikro.
5. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kinerja usaha mikro.
6. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja usaha mikro melalui pengelolaan keuangan.
7. Untuk mengetahui pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja usaha mikro melalui pengelolaan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan kontribusi secara teoritis terhadap pengembangan teori yang berkaitan hubungan pengaruh literasi keuangan terhadap kesejahteraan keuangan melalui pengelolaan keuangan keluarga.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi pelaku usaha

mikro Kabupaten Batang Hari untukkedepannya.

- a. Bagi Penulis, haisl penelitian ini di harapkan dapat menambahilmu pengetahuan khususnya layanan perbankan dan keuangan digital. Serta dampaknya bagi masyarakat.
- b. Bagi Mahasiswa, melatih mahasiswa untuk menguraikan dan membahas suatu permasalahan secara ilmiah, teoritis, dan sistematis. Serta sebagai tambahan pembelajaran bagi mahasiswa mengenai pembahasan yang terkait.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapatdigunakan sebagai referensi dan literatur untuk penelitian yang akan datang.